Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

Oleh : Yudhistira Nugraha

Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH., M.H.

Pembimbing II : Dr. Mukhlis R, SH., M.H.

Alamat: Jln. Delima Gang Keluarga Nomor 10 E Pekanbaru, Riau

Email : ydhistiranugraha@gmail.com / Telepon : 085363466436

ABSTRACT

Pancasila as the basis, ideology, and philosophy of the nation consists of five precepts, the first and foremost precepts are the precepts of the One Godhead. the interpretation of Article 29 paragraph (1) of the 1945 Constitution has six interpretations, three of which include the formation of law in Indonesia, every statutory regulation in Indonesia must not conflict with Islamic law for Muslims including the inheritance of the Criminal Code (KUHP) The Netherlands contained in Article 284 of the Criminal Code concerning Adultery Crimes is contrary to the teachings of Islam. This study entitled "Juridical Analysis of Adultery Crimes Based on Article 284 of the Criminal Code in the Perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law. Having the formulation of the problem What is the crime of adultery in the perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law, What are the weaknesses of the formulation of Article 284 of the Penal Code concerning criminal acts of adultery? Islamic Criminal Law and Pancasila.

The method in this study is normative legal research or the literature includes research on legal principles, legal systematics, vertical and horizontal synchronization, legal comparison, and legal history. In this case, the researcher discusses the comparison of laws, the comparison aims to provide knowledge about the similarities and differences between various fields of legal governance and basic understanding. Have conclusions. First, the regulation of criminal acts of adultery in criminal law is clearly not in accordance with the life of the community and the order of the scope of the law in the social life of the community at this time, or in other words not in accordance with the values of the Pancasila. second, the weaknesses contained in Article 284 of the Criminal Code, the problem generally lies in imprisonment sanctions that are so light that only 9 (nine) months imprisonment for the perpetrators of zina crime. Third, imprisonment sanctions and fine criminal sanctions in the 2018 Criminal Code Bill look so light. So that what we know is the criminal sanctions fined in the 2018 Criminal Code Bill, is not enough to seize independence from criminal offenders.

The author's suggestion, first, needs to be transformed Islamic legal values and values in Pancasila as essentially the State of Law, into the formulation of zina offenses and criminal sanctions in the framework of constructing thoughts on Article 284 concerning zina crime in renewing criminal law in the context of criminal law policy . Second, public awareness of the most important and main laws in dealing with zina crimes, if not regulated in the Criminal Code, the public must know that criminal acts of adultery are regulated and strictly prohibited in Islamic law. Third, the State must immediately design and accelerate the steps, in the drafting of the Laws and Regulations on the Criminal Code (KUHP Bill) which Indonesian people aspire to.

Keywords : Crime - Adultery - Criminal Law - Islamic Criminal Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya (nilai-nilai dalam setiap butir-butir sila-sila Pancasila) dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.¹

Hazairin telah menafsirkan Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 dalam enam tafsiran, tiga tafsiran diantaranya mengenai pembentukan hukum di Indonesia. Menurut Hazairin, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam, dan juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama lain yang berlaku di Indonesia, yaitu agama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, sepanjang ketentuan-ketentuan itu berlaku bagi masing-masing umat agama bersangkutan. Demikian pula ketentuan peraturan Perundang-Undangan tentang perzinahan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, tentu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam.²

Termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP tentang Tindak Pidana Perzinahan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Zina atau *Overspel* dalam Pasal 284 adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.³

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pasal 27 BW, sudah tidak relevan lagi dalam Pasal 284 KUHP. Jadi jika seorang suami melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang

bukan istrinya, ia telah melakukan delik perzinahan.⁴ Supaya masuk Pasal ini, maka persebutuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.⁵

Sedangkan di dalam Hukum Islam mengenai tindak pidana beserta sanksinya diatur didalam Hukum Pidana Islam, yang mana Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqih Jinayah. *Fiqih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.⁶

Dasar hukum sanksi zina didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nuur ayat 2 dan hadis Nabi saw yang diperjelas dengan Sunah Qualiah dan Fi'liah yaitu :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman”.⁷

Berdasarkan data pada tahun 2017 yang lalu tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni dini hari, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polresta Kota Pekanbaru menggelar razia di Hotel Sabrina Panam, aparat gabungan terpaksa membawa 18 orang diantaranya 10 wanita serta sisanya laki-laki yang tidak memiliki ikatan pernikahan. diduga pasang hendak berbuat mesum. Pasangan yang terjaring ini pun panik dan tidak bisa lagi mengelak. Disaat penggeledahan pasangan yang terjaring hanya bisa pasrah saat dibawa naik ke truk operasional, untuk dibawa ke markas Satpol PP Kota Pekanbaru.⁸

⁴Suharto RM, *Ibid.* hlm. 103.

⁵R Soesilo, *Op.cit.*hlm. 181.

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

⁷*Ibid.*

⁸<http://topriau.com/hukum/artikel/7272-18-orang-terjaring-razia-gabungan-di-hotel-sabrina-pekanbaru-diduga-berbuat-mesum.html> diakses pada tanggal 10 April 2019 pukul 20.00 wib.

¹ Mukhlis R, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, UR PREEES, Pekanbaru, 2012, hlm. 16.

²Neng Djubaedah, *Op.Cit.* hlm. 2.

³R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, 1974, hlm. 181.

Didalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinahan yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia, terkecuali yang melakukan zina yang diantaranya sama sekali tidak terikat tali perkawinan tidak dianggap suatu perbuatan zina. Sehubungan dengan warga negara Indonesia mayoritas beragama Islam, maka untuk memahami isi ketentuan dalam Pasal 284 KUHP tentang tindak pidana perzinahan, maka penulis akan mengkajinya melalui perspektif Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah serta permasalahan yang telah diuraikan diatas dan atas dasar inilah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum ilmiah untuk mengetahui sejauh mana pengaturan terkait tindak pidana perzinahan ditinjau dari Pasal 284 KUHP dan Hukum Pidana Islam dengan mengangkat judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam**”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tindak pidana perzinahan dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam ?
2. Apa sajakah kelemahan rumusan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana perzinahan ?
3. Apakah rumusan tentang tindak pidana perzinahan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional sudah sesuai dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Pancasila ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tindak pidana perzinahan dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.
- b. Untuk mengetahui kelemahan rumusan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana perzinahan.
- c. Untuk mengetahui tentang tindak pidana perzinahan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional

dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Pancasila.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk peneliti sendiri, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Riau
- c. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa serta Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia, dan oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasi ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusiannya yang beragam. Hal ini dapat terjadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain, juga karena adanya pengaruh perkembangan sejarah manusia.

Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *Nomoi*.⁹ Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.¹⁰ Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.¹¹

⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2.

¹⁰Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66.

¹¹Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 37.

Gagasan negara hukum Immanuel Kant dinamakan negara hukum liberal atau sering disebut dengan istilah “*Klassiek liberale en democratische rechtsstaat*”, atau disingkat dengan “*democratische rechtsstaat*”. Pemikiran Kant ini lazim disebut sebagai paham negara hukum dalam pengertian sempit, karena menempatkan fungsi hukum pada negara yang hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hak-hak individu. Dalam konsep tersebut, kekuasaan negara dipahami secara pasif yang hanya bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan (*nachtwakerstaat* atau *nachtwacterstaat*).¹²

Dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia menganut sistem negara hukum (*rechtsstaat*) yang dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum, yang diimplementasikan kepada Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakkan hukum telah dibentuk berbagai lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara Indonesia.¹³

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai

istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.¹⁴

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kebijakan atau politik hukum tidak terlepas dari bagian politik kesejahteraan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.¹⁵ Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan cara bertindak atau kebijakan dari Negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.¹⁶

3. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. “*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*”, yang artinya Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka disini

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 26.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 28.

¹⁶Samuel James Jhonson, “*Supreme Court of the United States*”, U.S Government Works, 2007, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 7 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹²Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 74.

¹³Emilda Firdaus, *Op. Cit.*, hlm. 39.

“pidana” merupakan perwujudan dari “celaan” tersebut.¹⁷

Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidana. ¹⁸ Secara umum tujuan pidana mempunyai tujuan ganda, yaitu:¹⁹

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pidana bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Dari tujuan pidana secara umum diatas berlanjut ke pembahasan berikutnya, dengan diawali dengan membicarakan tentang kesalahan dalam konteks tujuan penejaraan pidana atau pidana. Berbagai teori yang menjelaskan tujuan penejaraan pidana atau pidana menempatkan kesalahan dalam fungsi represif hukum pidana. Bagaimana tujuan penejaraan pidana atau pidana, menjadi dasar penentuan pidana atau tidak dipidanya pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan, menentukan dalam hal penejaraan pidana atau pidana. Tujuan penejaraan pidana atau pidana dikaitkan dengan kesalahan pembuat, menentukan alasan penejaraan, bentuk dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan.²⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).²¹
2. Yuridis adalah berdasarkan hukum; secara hukum; menurut hukum.²²
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²³
4. Perzinaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.²⁴
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah yang menjadi dasar hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia berlaku atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
6. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.²⁵
7. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.²⁶

¹⁷ Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 129.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, hlm. 93.

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekamaru-Bandung, 2011, hlm. 141.

²⁰ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 131.

²¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm. 1612.

²² *Ibid.*

²³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 54.

²⁴ R Soesilo, *Loc. Cit.*, hlm. 181.

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.

²⁶ Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*, hlm. 1.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian kepustakaan, pendekatan ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, kamus, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perzinaan Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Perzinaan Dalam Hukum Pidana

Zina merupakan suatu *opzettleijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Itu berarti unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinaan dari tindak perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam Pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Penjelasan Pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²⁸

Di dalam Pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Penjelasan Pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota

²⁸R. Soesilo, *Op.Cit.* hlm. 209.

perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Perzinaan Dalam Hukum Pidana Islam

Kata *Hudud* (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. Secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Dalam bahasan *Fiqh* (hukum Islam), *had* artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syariat yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Tindak kejahatan baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut dengan *Jarimah*. *Jarimah al-hudud* berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*. Pengertian *Jarimah* pada umumnya, dimana *Jarimah* itu disamakan dengan (dosa) dan (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun *ukhrawi*.³⁰

Menurut Hukum Islam perzinaan dianggap sebagai salah satu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *Jarimah*. Zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Zina diharamkan dalam segala keadaan. Zina secara harfiah artinya *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah "Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa

disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut".³¹ Para fuqaha (ahli Hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan buah zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat. Wanita yang dinyatakan haram adalah wanita yang bukan istrinya dan bukan pula sarirah (selir) atau amah (budak).

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU KUHP Nasional

1. Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU KUHP Nasional

Upaya pembaruan hukum pidana dalam pembentukan suatu RUU KUHP Nasional merupakan kebutuhan pokok masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Keamanan dalam naungan hukum didambakan oleh warga masyarakat yang mengalami "ketakutan terhadap kejahatan" (*fear of crime*) sehingga perlu upaya penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana sebagai bagian dari langkah kebijakan, karena semakin meningkatnya kualitas, kuantitas, dan intensitas pelanggaran hukum. Semua ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana.

Upaya ini dapat dicapai dengan terbentuknya suatu KUHP Nasional. Artinya, adanya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan suatu undang-undang pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral (terpadu) dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan atau politik hukum pidana ini merupakan bagian integral pula dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*), yakni segala yang rasional untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup pada perlindungan masyarakat terhadap berbagai pelanggaran hukum.³²

²⁹R. Soesilo, *Op.Cit.* hlm. 209.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9.

³¹Neng Djubaedah, *Op.Cit.*, hlm. 119.

³²Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 18.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan subjek hukum, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.³³

Hazairin telah menafsirkan Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 dalam enam tafsiran, tiga tafsiran diantaranya mengenai pembentukan hukum di Indonesia. Menurut Hazairin, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam, dan juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama lain yang berlaku di Indonesia, yaitu agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, sepanjang ketentuan-ketentuan itu berlaku bagi masing-masing umat agama bersangkutan. Demikian pula ketentuan peraturan Perundang-Undang tentang perzinaan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, tentu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam.

Oleh karenanya, hukum Islam memandangnya sebagai Jarimah dan mengancamnya dengan hukuman dera, rajam, dan pengasingan, dalam keadaan dan bentuk bagaimanapun juga, baik dilakukan dengan suka sama suka, oleh perjaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Hal demikian didasarkan pada Surah An-Nuur ayat 2. Kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah saw, dengan Sunah Qauliah dan Fi'liyah. Surah An-Nuur ayat 2 berbunyi sebagai berikut:³⁴

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.

Adapun Sunah Qauliah yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:³⁵

Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw, bersabda; “Ambillah diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (perzina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”.

Akan tetapi, hukum positif tidak menganggap hubungan kelamin di luar pernikahan sebagai tindak pidana dan karenanya tidak mengancamnya dengan hukuman, kecuali apabila terjadi perkosaan terhadap salah satu pihak atau pelakunya adalah orang yang masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Dalam pasal 284 KUHP disebutkan:³⁶

- 1) Dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 - a. Laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;
 - b. Perempuan yang bersuami yang berzina.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina dan dalam hal bagi suami atau istri berlaku Pasal 27 Kitab Undang-

³⁵*Ibid.*

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op.Cit.*, hlm. 28.

³³Emilda Firdaus, *Loc.Cit*, hlm. 39.

³⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Loc.Cit*, hlm. 37.

Undang Hukum Perdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia masukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.

Tindak pidana perzinaan dalam Islam merupakan delik biasa bukan merupakan delik aduan. Islam itu memandang bahwa zina itu termasuk dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan, karena sudah jelas ada nas yang melarang tindak pidana tersebut. Apabila ada seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana perzinaan, maka ia dapat melaporkan tindakan tersebut. Namun, perlu juga diperhatikan dalam kasus perzinaan ini hukum Islam tidak sembarangan dalam memprosesnya. Ada syarat-syarat yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembuktian dalam kasus perzinaan.

Di jelaskan bahwa, ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP berisi bahwa undang-undang menentukan terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, dalam pandangan 'Barat' yang individualistik-liberalistik, hak-hak dan kebebasan individual (termasuk didalam bidang hukum seksual atau moral sangat menonjol dan dijunjung tinggi. Sepanjang hubungan seksual atau moral itu bersifat individual, bebas tanpa paksaan, hal demikian di pandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu wajar perzinaan dan lembaga perkawinan di pandang bersifat sangat pribadi (privat).³⁷

Berdasarkan uraian diatas, wajar saja kalau KUHP yang notabeneanya merupakan produk asli dari Barat mengkategorikan perzinaan sebagai delik aduan. Karena, hukum Barat dipengaruhi dengan ajaran yang berfaham *individualisme*, *liberalisem*, dan *individual rights*. Jimly Ashiddiqie

berpendapat bahwa perzinaan dalam hukum barat di anggap sebagai delik aduan hanya keharusan moral untuk setia kepada suami dan isteri.³⁸

Berbeda dengan hukum pidana Islam, yang menyatakan bahwa perzinaan bukan merupakan delik aduan yang memerlukan adanya pengaduan dari pihak-pihak yang berhak supaya delik ini bisa diproses secara hukum. Menurut hukum pidana Islam delik perzinaan merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak masyarakat, dan hak keluarga dari pelaku zina. Sehingga wajar apabila tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman yang berat.

Dalam hal ini, penulis menganalisa pengaturan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana jelas tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat dan tatanan ruang lingkup hukum dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Perbedaan sistem hukum yang merupakan warisan Hindia Belanda yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya hukum masyarakat Indonesia inilah merupakan sumber masalah.³⁹ Perlu diketahui, dalam hukum Barat khususnya dalam hukum pidana Belanda perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang tercela. Kecuali, salah satu pihak telah terikat pernikahan dengan pihak lain. Itupun tergolong sebagai delik aduan yang dapat diproses dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan, itupun masih dengan catatan jika si suami atau istri berzina. Sangat nyata terlihat disini, bahwa hukum pidana memberikan perlindungan kepada suami atau istri merasa dirugikan, itupun masih dengan catatan jika si suami atau istri merasa dirugikan. Jika tidak, maka perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

³⁸Jimly Ashiddiqie, *Pembaharuan Hukum Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 93.

³⁹Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 Agustus 2010, hlm. 31.

³⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 254.

merupakan perbuatan yang biasa-biasa saja.⁴⁰

Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan pribadi dan juga mengatur dalam lingkup penodaan ikatan perkawinan. Akan tetapi, mengatur secara menyeluruh atau keseluruhan tanpa memandang adanya pengaduan terlebih dahulu. Hal tersebut, dapat dilihat dari jenis sanksi bagi pelaku zina yang tidak hanya memandang salah satunya tidak terikat tali perkawinan saja, melainkan satu sama lain sama-sama tidak terikat dalam tali perkawinan.

Tidak hanya hukum pidana, hukum pidana Islam juga mengenal asas legalitas. Hal tersebut tercantum pada Al-Qur'an pada Surah Al-Qasas ayat 59 yang berbunyi, "dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di Ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman".

Melihat dari pengaturan zina dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam ini. Penulis menganalisa, bahwa ketentuan pidana zina dalam hukum pidana Islam jelas memberikan efek jera dan memberikan dampak rasa takut kepada orang untuk melakukan zina. Sedangkan dalam Pasal 284 KUHP, tidak membuat orang jera ataupun takut melakukan tindak pidana pidana tersebut. Hal demikian, dapat dilihat dari maraknya ditemukan pasangan mesum diluar ikatan perkawinan disejumlah tempat penginapan dari hotel, wisma, dan kos-san dalam berbagai tiap-tiap operasi razia penyakit masyarakat (pekat) yang dilakukan oleh Satpol PP, Kepolisian, dan maupun BNN dalam operasi razia pengedaran Narkotika.

Padahal, tujuan pemidanaan menurut Andi Hamzah adalah penjeraan (*deterent*), baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi)

jahat.⁴¹ Senada yang diutarakan oleh Muladi, bahwa tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial (*individual and social image*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴²

B. Kelemahan Rumusan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perzinaan

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berprinsipkan negara hukum, menurut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, undang-undang dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴³

Penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu konsekuensi dari sebuah negara hukum, perlindungan hak atas kepentingan diri yang dijamin oleh negara dalam hal hubungan hukum antara individu dengan masyarakat, maupun hubungan dengan negara. Maka berlakulah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasarnya.⁴⁴

Didalam rumusan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP juga diisyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku, yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW itu berlaku bagi dirinya. Apabila ternyata didalam persidangan yang memeriksa perkara perzinaan, syarat pengetahuan berlakunya ketentuan Pasal 27 BW tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum maka hakim harus memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) bagi pelaku. Adapun Pasal 27 BW yang dijadikan salah satu unsur dari tindak pidana perzinaan itu berbunyi, " pada saat yang sama, seorang pria hanya dapat terikat oleh

⁴¹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1993, hlm. 25.

⁴²Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

⁴³Mukhlis R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 Februari 2011, hlm. 186.

⁴⁴Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

⁴⁰Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 31.

suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang pria”.

Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b menentukan larangan bagi seorang wanita yang telah menikah melakukan perzinahan dengan seorang pria. Berdasarkan ketentuan ini dapat diambil pengertian bahwa seorang wanita didakwa melakukan zina apabila telah memenuhi satu unsur saja, yakni ia telah menikah. Wanita itu tidak diharuskan tunduk pada Pasal 27 BW sebagaimana seorang laki-laki yang berzina, karena Undang-Undang telah menentukan secara umum tentang dapat dipidanya seorang wanita yang telah kawin yang melakukan suatu perzinahan.

Dari uraian diatas dapat dilihat permasalahan pada Pasal 284 KUHP, permasalahan tidak mungkin ada jika tidak ada kelemahan. Maka kelemahan Pasal 284 KUHP tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Permasalahan lain yang tidak kalah penting dari delik perzinahan adalah ketentuan mengenai pengaduan dalam Pasal 284 angka (2) dan (3). Yang pertama mengenai ketentuan Pasal 284 angka (2) dimana disebutkan bahwa Tindak pidana zina tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Dalam ketentuan tersebut terdapat hal yang rancu atau tidak jelas di mana pihak ketiga yang tercemar dapat melakukan pengaduan terhadap mereka yang diduga melakukan persetubuhan di luar kawin. Hal ini sangatlah berbahaya karena batasan mengenai pihak ketiga yang tercemar juga belum jelas dan tidak memiliki kepastian hukum. Siapapun yang merasa dirinya tercemar karena terdapat perbuatan persetubuhan di luar nikah yang dilakukan orang lain dapat mengadukan orang tersebut atas dugaan tindak pidana perzinahan.
- b. Disamping itu, permasalahan serta kelemahan Pasal 284 KUHP yang diuraikan diatas, masalah umumnya terletak pada perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang

keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinahan.

- c. Batasan yang diberikan KUHP itu dirasa sangat sempit. Namun hal ini perlu dimaklumi, karena KUHP disusun oleh kolonial Belanda yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat dalam memandang perbuatan zina. Dalam hal ini, dapat dilihat dari maraknya perbuatan zina yang terjadi di Indonesia yang tidak memandang salah satunya terikat tali perkawinan, melainkan satu sama lain sama-sama tidak terikat tali perkawinan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi penerus bangsa ini.
- b. Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 284 membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinahan dalam berbagai bentuk dan variasinya, keberadaan Pasal tersebut tentunya sudah sangat tidak relevan dan tidak dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut ideal sebagai produk hukum yang menjamin tegaknya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan hukum yang dicita-citakan.
- c. Pada kenyataannya, substansi pada Pasal 284 KUHP tidak mampu mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai yang hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum adat maupun agama. Hal ini, tentunya menjadi bahan perenungan dan kajian mendalam bagi para akademisi yang memiliki konsensi terhadap ekisistensi hukum Islam, para pakar hukum dan pemerhati hukum Islam serta masyarakat pada umumnya.⁴⁵

⁴⁵Susiatiningsih, “Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2006, hlm. 15.

Sebab, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam memiliki kepastian hukum yang jelas dalam memberikan efek jera kepada pelaku zina, agar tidak mengulangi tindak pidana perzinaan tersebut. Kendatipun, dalam praktiknya tidak berperan penuh dan menyeluruh, tetapi hukum pidana Islam memiliki arti besar bagi pemeluknya. Yang pada umumnya, seperti apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.⁴⁶

C. Rumusan Tentang Tindak Pidana Perzinaan Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Pancasila

Lebih dari 70 tahun Indonesia telah merdeka, artinya terlepas dari belenggu dari penjajahan (tatanan politik). Dalam hal ini berarti Indonesia sudah saatnya membangun tatanan hukumnya sendiri guna menggantikan tatanan hukum kolonial yang bersumberkan pada pandangan hidup yang individualistik. Hukum pidana yang dibangun hendaklah bersumber dari budaya hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia ditengah-tengah pergaulan masyarakat beradap.⁴⁷

Dari uraian diatas, Pasal 446 ayat 1 huruf e RUU KUHP Tahun 2018 tidak memberikan atau tidak mengikat secara penuh pada pemberian sanksi baik itu secara sanksi pidana maupun sanksi pidana dendanya. Sebab, RUU KUHP Tahun 2017 sanksi pidana dan pidana denda bagi pelaku tindak pidana zina lebih sesuai serta lebih mengedepankan penjeraan terhadap pelaku tindak pidana perzinaan (pidanaan dari para ahli). Yang mana, rumusan Pasal 484 ayat (1) hingga ayat (4) bagi pelanggarnya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk sanksi pidana denda Kategori III dan Kategori IV RUU KUHP

Tahun 2017 diatur dalam Pasal 138D yang diantaranya, untuk Kategori III Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Kategori IV Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah prinsip keadilan, yaitu gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya.⁴⁸ Meskipun RUU KUHP Tahun 2018 ini masih dalam rancangan dan juga belum murni (*pure*) disah menjadi produk hukum pidana Indonesia, masih ada tahap selanjutnya untuk melakukan perubahan kedepannya yang sungguh-sungguh sesuai dalam tatanan kehidupan masyarakat, melalui kebijakan hukum pidana yang berbicara tentang pembaruan hukum (KUHP) yang berulang kali dinyatakan dalam berbagai seminar Nasional maupun Internasional bahwa, pembaruan hukum pidana dan penegakkan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum yang tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.⁴⁹ Seyogyanya, juga harus dilatar belakangi oleh sumber-sumber yang berorientasi kepada ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang mengandung didalamnya konsep ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Loc. Cit, hlm. 28.

⁴⁷Ali Zaidan, *Ibid*, hlm. 127.

⁴⁸Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm. 4.

⁴⁹Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 25.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana jelas tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat dan tatanan ruang lingkup hukum dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Perlu diketahui, dalam hukum Barat khususnya dalam hukum pidana Belanda, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang tercela. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan pribadi dan juga mengatur dalam lingkup penodaan ikatan perkawinan. Akan tetapi, mengatur secara menyeluruh atau keseluruhan tanpa memandang adanya pengaduan terlebih dahulu. Hal tersebut, dapat dilihat dari jenis sanksi bagi pelaku zina yang tidak hanya memandang salah satunya tidak terikat tali perkawinan saja, melainkan satu sama lain sama-sama tidak terikat dalam tali perkawinan.
2. Kelemahan yang terdapat didalam Pasal 284 KUHP, masalah umumnya terletak pada sanksi pidana penjara yang begitu ringan hanya 9 (sembilan) bulan penjara bagi pelaku tindak pidana zina, begitu juga kelemahan lainnya terletak pada perbuatan yang disebut sebagai perzinaan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinaan. Batasan yang diberikan KUHP itu dirasa sangat sempit. Namun hal ini perlu dimaklumi, karena KUHP disusun oleh kolonial Belanda yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat dalam memandang perbuatan zina.
3. Sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda pada RUU KUHP Tahun 2018 terlihat begitu ringan. Sehingga yang mana kita ketahui sanksi pidana denda

pada RUU KUHP 2018 tersebut, tidak cukup untuk merampas kemerdekaan dari pelaku tindak pidana perzinaan. Akan tetapi, lebih mengedepankan perlindungan terhadap perempuan. Dengan tidak berlakunya Pasal 446 ayat (1) huruf e atas penjabaran pada Pasal 447 ini, maka zina hanya memberatkan kepada laki-laki sebagai pelaku tindak pidana zina dan perempuan dianggap sebagai korban sehingga tidak dapat dipidana. Dan rumusan Pasal 447 atas penjabaran Pasal 446 RUU KUHP Tahun 2018 ini, disebutkan adanya janji akan dikawini oleh laki-laki. Dalam hal pembuktian tindak pidana zina dalam Pasal ini, perlu adanya pengakuan dari pihak laki-laki yang telah memberikan janji kepada pihak perempuan akan dikawini. Tentunya, bertolak belakang dengan hukum pidana Islam yang beranggapan zina yang dilakukan atas ikatan suka sama suka tanpa ikatan perkawinan dapat di Had (dihukum). Tidak hanya memandang laki-laki sebagai pelaku dan dapat dikenai pidana, melainkan perempuan juga dapat dikatakan sebagai pelaku zina dan dapat dihukum. Sudah jelaslah jika tindak pidana perzinaan dalam RUU KUHP Nasional Tahun 2018 juga ikut bertolak belakang atau bertentangan dengan sila pertama dan utama dari Pancasila yaitu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Saran

1. Perlu ditransformasikan nilai-nilai hukum Islam serta nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasarnya Negara Hukum, kedalam perumusan delik zina serta sanksi pidananya dalam rangka konstruksi pikiran terhadap Pasal 284 tentang tindak pidana zina dalam pembaruan hukum pidana dalam konteks kebijakan hukum pidana.
2. Kesadaran diri masyarakat terhadap hukum paling penting dan utama dalam menanggulangi kejahatan zina. Sebab, jika memang tindak pidana perzinaan tidak atur secara menyeluruh dan tidak sesuai kondisi sosial masyarakat saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masyarakat harus tau bahwa tindak pidana perzinaan diatur dan dilarang keras dalam hukum Islam.

3. Negara secepatnya harus merancang dan mempercepat langkah, dalam pembuatan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang didambakan seluruh masyarakat Indonesia.

Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat”, Liberty, Yogyakarta.

Djubaedah, Neng 2010, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekambaru-Bandung.

Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradyna Paramitha, Jakarta.

_____, 2009, *Delik Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hanitijo, Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ibrahim, Harmaily, dan Kusnardi, Moh, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.

HR, Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda, Chairul, 2005, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Prenada Media, Jakarta.

Kusumohamidjojo, Budiono, 2004, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief, Nawawi, Barda, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Adang, dan Anwar, Yesmil, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Grasindo, Jakarta.

Ashiddiqie, Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Indonesia*, Angkasa, Bandung.

Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Azhary, Tahir, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

Azhari, Tahir, Muhammad, 1992, *Negara Hukum Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.

Budiarjo, Miriam, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Dewantara, Agung, Nanda, 1998, “*Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan*

- Mamudji, Sri, Soekanto, Soerjono, 2014, *penelitian hukum normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukhlis R, 2012, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, UR PREES, Pekanbaru.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- R Soesilo, 1974, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Suharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutatiek, Sri, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria, 2011, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sholehuddin, 2002, “*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*” *Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Kota Besar.
- Wardi Muslich, Ahmad, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 Agustus 2010.
- Hendri Nauli Rambe, 2016, *Perzinaan dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perzinaan di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mukhlis R, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 Februari 2011.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Susiatiningsih, 2006, “Tindak Pidana Perzinaan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Widya Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai ?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 Agustus 2010.

B. Jurnal/Kamus

- Ahmad Bahiej, 2003, “Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (*Overspel*) dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*,

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 2.
- Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 3.
- Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 68.
- Sunah Qauliah.
- Hadis HR Al-Bukhari dan Ibnu Hibban.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.